

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029



RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL
TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan taufik dan hidayah Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2025-2029 Kabupaten Karanganyar dapat diselesaikan. Dokumen Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

Penyusunan dokumen perencanaan ini berpedoman pada Inmendagri Nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 disusun dengan berdasarkan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah di lingkup Dinas Sosial.

Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap aparatur perangkat daerah di Dinas Sosial yang telah menyediakan data dan informasi serta masukan dalam penyusunan dokumen ini. Semoga penyusunan ini bermanfaat bagi kemajuan Dinas Sosial dimasa mendatang.

Karanganyar, September 2025
Kepala Dinas Sosial

Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650925 198603 1 015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-3
1.4. Sistematika Penulisan	I-3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL.....	II-1
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II-1
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	II-12
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	III-1
3.1. Tujuan dan Sasaran	III-1
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan	III-3
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV-1
4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan	IV-1
4.2. Indikator Kinerja Utama	IV-27
4.3. Indikator Kinerja Kunci	IV-29
BAB V PENUTUP	V-1
5.1. Kaidah Pelaksanaan	V-1
5.2. Pedoman Transisi	V-1
5.3. Pedoman Penyusunan Evaluasi dalam Manajemen Pengelolaan Resiko	V-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Bagan Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota..... I-1

Gambar 2. 1. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar..... II-2

Gambar 4.1. Pohon Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar IV-23

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1.	Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025.....	II-4
Tabel 2. 2.	Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Golongan Tahun 2025.....	II-4
Tabel 2. 3.	Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2025	II-4
Tabel 2. 4.	Capaian Kinerja Indikator Utama Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 -2024	II-7
Tabel 2. 5.	Capaian Kinerja Indikator Kunci Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 -2024	II-7
Tabel 2. 6.	Capaian Kinerja Indikator Program Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 -2024.....	II-8
Tabel 2. 7.	Capaian Kinerja Indikator Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 -2024.....	II-10
Tabel 2. 8.	Capaian Kinerja Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 -2024.....	II-11
Tabel 2. 9.	Rumusan Permasalahan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.....	II-13
Tabel 2. 10.	Teknik menyimpulkan Isu Strategis Dinas Sosial.....	II-14
Tabel 3. 1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029	III-2
Tabel 3. 2.	Tahapan Rencana Strategis	III-4
Tabel 3. 3.	Arah Kebijakan Dinas Sosial Karanganyar Tahun 2025-2029.....	III-5
Tabel 4. 1.	Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Dinas Sosial	IV-4
Tabel 4. 2.	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	IV-15
Tabel 4. 3.	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-24
Tabel 4. 4.	Dukungan Kegiatan Kabupaten Karanganyar Terhadap 35 Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah yang Didelegasikan ke Kabupaten/Kota	IV-26
Tabel 4. 5.	Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial	IV-28
Tabel 4. 6.	Indikator Kinerja Kunci	IV-30

BAB I
PENDAHULUAN

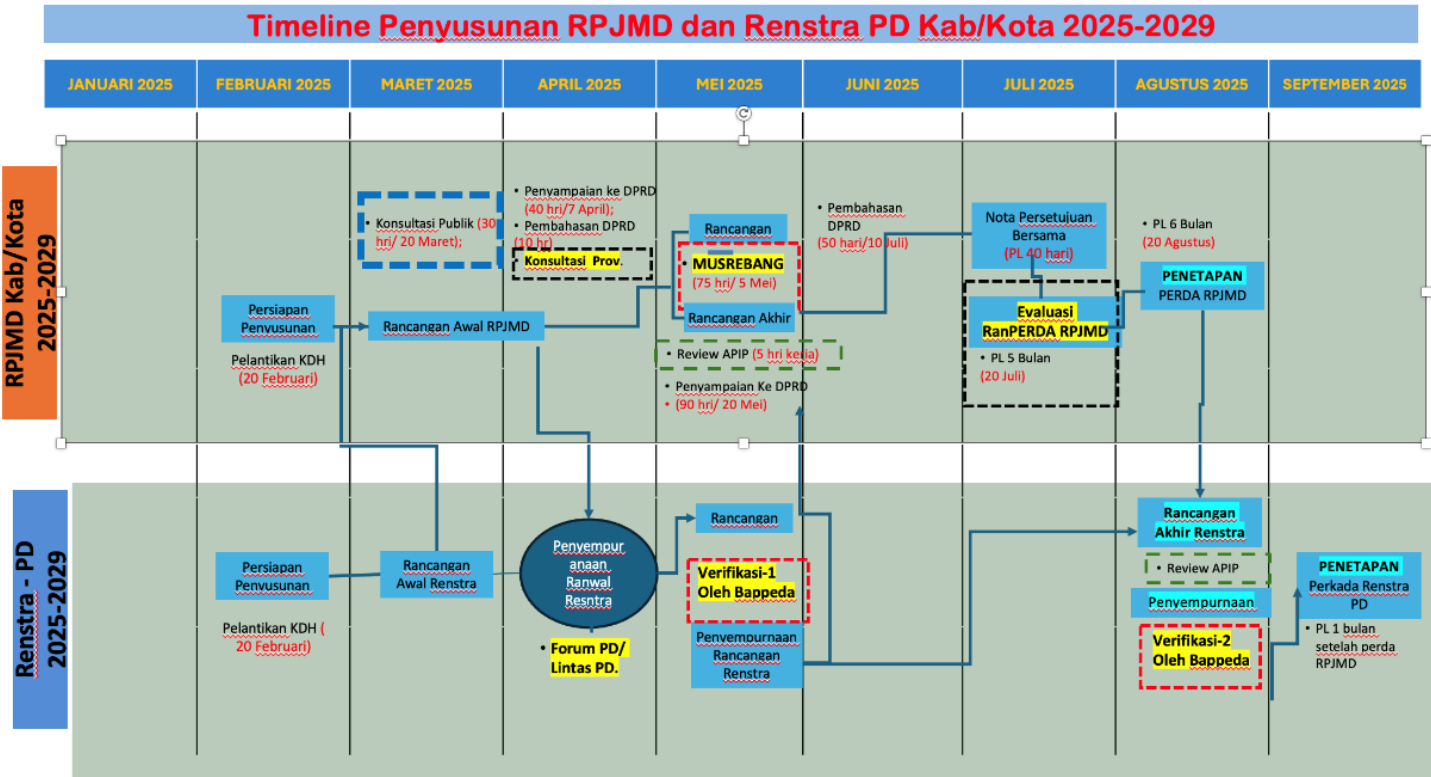
1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar merupakan bagian integral dari proses perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025–2029 dan dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan jangka menengah yang selaras dengan arah kebijakan nasional, prioritas pembangunan provinsi, serta kebutuhan dan potensi daerah.

Renstra Dinas Sosial disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029. Dokumen ini menjadi pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial selama lima tahun ke depan, terutama dalam merespons berbagai tantangan sosial, seperti kemiskinan, perlindungan anak dan lansia, penyandang disabilitas, serta pemberdayaan masyarakat rentan.

Dalam konteks kebijakan nasional, pemerintah pusat menekankan pentingnya penguatan sektor perlindungan sosial sebagai salah satu prioritas pembangunan manusia. Hal ini diperkuat melalui Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 yang menggarisbawahi prinsip integrasi, kolaborasi lintas sektor, dan berbasis data dalam setiap tahapan perencanaan daerah. Oleh karena itu, Renstra ini disusun dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan top-down-bottom-up, sebagaimana diamanatkan dalam regulasi tersebut.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang wajib disusun oleh masing-masing perangkat daerah. Proses penyusunannya dilaksanakan secara sistematis melalui beberapa tahapan, yang dapat digambarkan dalam bagan alir berikut.



Sumber : Inmendagri No. 2 Tahun 2025

Gambar 1.1
Bagan Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Kabupaten Karanganyar sendiri menghadapi tantangan sosial yang cukup kompleks, mulai dari meningkatnya jumlah warga miskin, ketimpangan sosial antar wilayah, hingga kebutuhan akan layanan sosial yang responsif dan inklusif. Di sisi lain, potensi sosial lokal seperti solidaritas masyarakat, peran organisasi sosial, serta keberadaan lembaga kesejahteraan sosial menjadi modal penting yang perlu dioptimalkan.

Dengan demikian, penyusunan Renstra Dinas Sosial ini bertujuan untuk memberikan arah, sasaran, dan strategi yang terukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial. Dokumen ini tidak hanya menjadi pedoman internal perangkat daerah, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas publik atas komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 181).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 adalah sebagai penjabaran atas RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dan sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu 5 tahun (2025-2029).

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Dinas Sosial Karanganyar sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar setiap tahunnya.
3. Sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029

1.4. Sistematika

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini memuat gambaran pelayanan perangkat daerah yang terdiri dari tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah; sumber daya perangkat daerah; kinerja pelayanan perangkat daerah; kelompok sasaran layanan. Permasalahan dan Isu Strategis.

Bab III Tujuan, Sasaran , Strategi Dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat uraian program, kegiatan dan sub kegiatan, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra melalui indikator kinerja utama (IKU) Perangkat Daerah, target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK)

Bab V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.

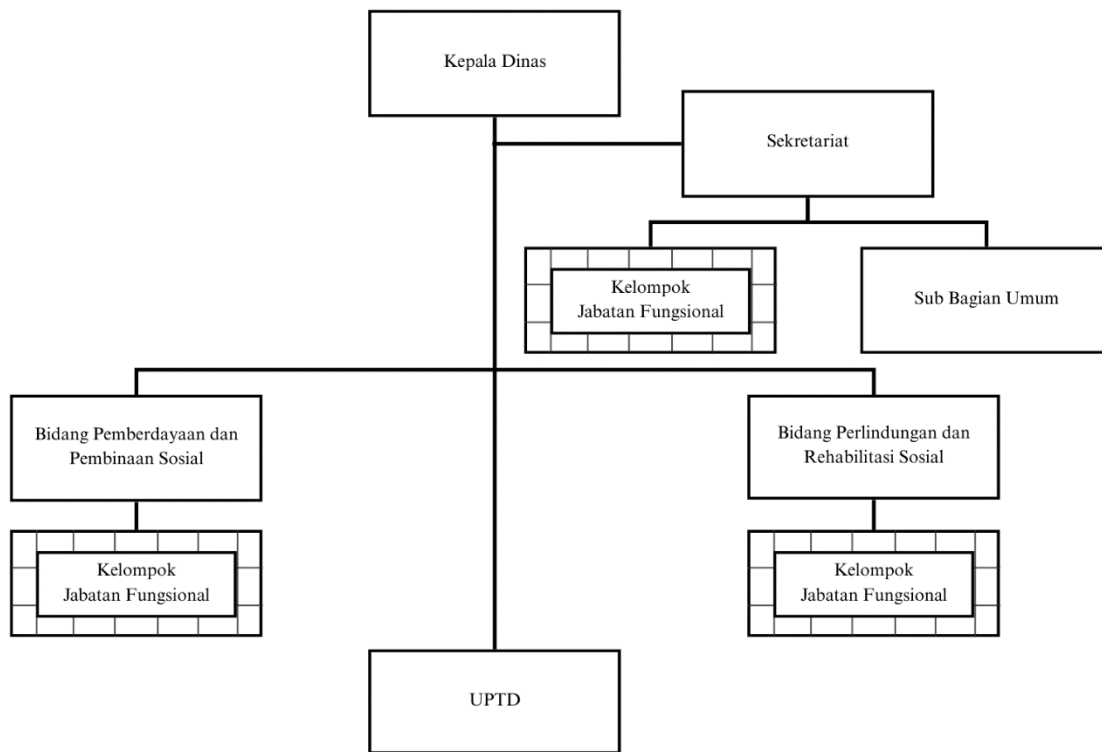
Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

1. Kedudukan dan Susunan Organisasi

Dinas Sosial merupakan unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial. Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Susunan organisasi Dinas Sosial terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan;
 - 1) Subbagian Umum; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial;
- d. Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial;
- e. UPTD; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar

2. Tugas dan Fungsi

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati. Dalam, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- 1) perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;
- 2) pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;
- 3) pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;
- 4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesejahteraan sosial;
- 5) pelaksanaan administrasi Dinas Sosial di bidang kesejahteraan sosial;
- 6) pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- 7) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian dan pelayanan administrasi Dinas Sosial. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi :

- 1) pengoordinasian kegiatan;
- 2) pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- 3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan,

kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;

- 4) pengoordinasian tatalaksana;
- 5) pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- 6) pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 7) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- 8) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 9) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial

Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial merupakan unsur pelaksana pemberdayaan dan pembinaan sosial. Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial mempunyai tugas perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan pembinaan sosial. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial mempunyai fungsi:

- 1) perumusan perencanaan pemberdayaan dan pembinaan sosial;
- 2) pelaksanaan pemberdayaan dan pembinaan sosial;
- 3) pengelolaan bantuan sosial;
- 4) pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan pembinaan sosial; dan
- 5) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial

Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial merupakan unsur pelaksana perlindungan dan rehabilitasi sosial. Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial melaksanakan tugas perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perlindungan dan rehabilitasi sosial. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

- 1) perumusan perencanaan perlindungan, rehabilitasi sosial dan penyantunan anak dan keluarga;
- 2) pengelolaan perlindungan, rehabilitasi sosial dan penyantunan anak dan keluarga;
- 3) penanganan permasalahan sosial;
- 4) pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan rehabilitasi sosial; dan
- 5) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai yang bekerja di Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar sebanyak 66 orang, yang terdiri atas PNS sebanyak 25 orang dan Non ASN sebanyak 41 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan sebanyak 1 orang berpendidikan SD, 24 orang berpendidikan SMA, 5 orang D3, 30 orang S1 dan 6 orang S2. Rincian lengkap mengenai jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan disajikan dalam berikut :

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Berdasarkan
Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		NON ASN (THL)		Jumlah
		L	P	L	P	
1	2	3	4	7	8	9
1	SD Sederjat	1	0	0	0	1
2	SMP Sederajat	0	0	0	0	0
3	SMA Sederajat	5	0	17	2	24
4	D3	0	1	2	2	5
5	S1	3	9	3	15	30
6	S2	3	3	0	0	6
	Jumlah	12	13	22	19	66

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Berdasarkan
Golongan Tahun 2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Golongan I			
2	Golongan II	5	1	6
3	Golongan III	4	10	14
4	Golongan IV	2	2	4

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

Berdasarkan data dalam tabel, terlihat bahwa komposisi sumber daya manusia di Dinas Sosial cukup beragam dari sisi jenjang pendidikan. Mayoritas pegawai memiliki latar belakang pendidikan S1, yaitu sebanyak 30 orang,

2. Sarana dan Prasarana

Upaya untuk mencapai target kinerja diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, berikut kondisi sarana dan prasarana di Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.

Tabel 2.3.
Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Sosial
Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
1	Bangunan Gedung Kantor	m2	900		900
2	AC	buah	25	8	33
3	Alat Pemadam/Portable	buah	4		4
4	Alat Penghancur Kertas	buah	2		2
5	Laptop	buah	28	16	44
6	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) / Biru	unit	1	1	2
7	Sedan/avanza	unit	3		3
8	Station Wagon/Innova	unit	1		1
9	kendaraan bermotor angkutan barang lainnya (dst)/truk	unit	1		1
10	Pick Up/strada	buah	1		1
11	Note Book	buah	21		21
12	P.C Unit	buah	16	1	17
13	Printer (Peralatan Personal Komputer)	buah	18	6	24

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
14	Sepeda Motor	unit	54	3	57

Sumber : Sekretariat DINAS SOSIAL Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial adalah unsur pendukung kepala daerah yang melaksanakan fungsi di bidang sosial. Kepala Dinas Sosial sebagaimana mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam mengkoordinasi pencapaian bidang sosial.

Berdasarkan data tabel 2.4, indikator kinerja kesejahteraan sosial periode 2020-2024, sebagian besar indikator menunjukkan pencapaian yang sempurna dengan konsistensi tinggi. Indikator-indikator seperti persentase PSKS yang berperan aktif, pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta penanganan korban bencana mencapai 100 persen secara konsisten tanpa mengalami pertumbuhan negatif.

Meskipun demikian, beberapa indikator kuantitatif mengalami fluktuasi signifikan yang mencerminkan dinamika pelayanan sosial. Jumlah keluarga penerima manfaat bantuan sosial mengalami penurunan drastis dari 7.935 keluarga pada 2020 menjadi 445 keluarga pada 2023, namun kembali meningkat menjadi 2.100 keluarga pada 2024. Program bimbingan sosial menunjukkan peningkatan partisipasi dari 80 orang menjadi 200 orang dengan rata-rata pertumbuhan 27,5 persen.

Berdasarkan data tabel 2.5 capaian kinerja kesejahteraan sosial periode 2021-2024, sebagian besar indikator menunjukkan pencapaian yang sangat optimal dengan persentase capaian 100 persen secara konsisten. Indikator-indikator strategis seperti persentase PSKS yang berperan aktif, pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta penanganan korban bencana alam berhasil mencapai target yang ditetapkan tanpa mengalami penyimpangan. Demikian pula dengan program peningkatan lembaga kesejahteraan sosial dan kegiatan di luar Standar Pelayanan Minimal yang terlaksana dengan sempurna, mencerminkan komitmen organisasi dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial yang komprehensif kepada masyarakat.

Program-program operasional juga menunjukkan ketepatan sasaran yang sangat baik dengan pencapaian 100 persen pada seluruh periode pengamatan. Jumlah sertifikat peningkatan sumber daya manusia LK3, bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas, dan program bimbingan sosial kepada berbagai kelompok sasaran berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis. Bahkan terdapat beberapa indikator yang melampaui target, seperti penanganan lansia terlantar dan kelompok rentan yang mencapai 115 persen pada tahun 2023. Capaian kinerja yang optimal ini menunjukkan efektivitas perencanaan program dan kemampuan organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan data tabel 2.6, anggaran program kesejahteraan sosial periode 2021-2024, kinerja realisasi anggaran menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat baik dengan sebagian besar program mencapai persentase realisasi di atas 90 persen. Program Pemberdayaan Sosial menunjukkan konsistensi tinggi dengan realisasi anggaran berkisar antara 98-100 persen, mencerminkan ketepatan perencanaan dan

pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Program Penanganan Bencana mencapai realisasi sempurna 100 persen pada seluruh periode, menunjukkan kesiapsiagaan dan responsivitas organisasi dalam menghadapi situasi darurat. Sementara itu, Program Rehabilitasi Sosial mempertahankan realisasi yang stabil antara 93-100 persen, mengindikasikan komitmen yang kuat dalam memberikan layanan rehabilitasi kepada kelompok sasaran.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial mengalami fluktuasi realisasi yang cukup signifikan, terutama pada tahun 2022 yang hanya mencapai 65 persen dari target anggaran, namun berhasil pulih pada tahun-tahun berikutnya dengan pencapaian 97-100 persen. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai program dengan alokasi anggaran terbesar menunjukkan realisasi yang bervariasi antara 89-100 persen, dengan pencapaian optimal pada tahun 2023. Secara keseluruhan, tingginya persentase realisasi anggaran menunjukkan kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya keuangan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan program kesejahteraan sosial yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis.

Berikut capaian kinerja Tahun 2021-2024, Dinas Sosial:

Tabel 2.4.
Capaian Kinerja Indikator Utama Dinas Sosial
Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 -2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun					Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun					Persentase Capaian Pada Tahun (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase PPKS yang terlayani	%	NA	NA	NA	69,34	71	NA	NA	69,34	70,58	71,28	NA	NA	NA	101,78	100,39
2	Indeks SPM Sosial	Indeks	NA	100	100	100	100	NA	100	100	100	100	NA	100	100	100	100
3	Persentase PPKS Non SPM yang terlayani	%	NA	NA	NA	69,23	70,75	NA	NA	NA	70,39	71,07	NA	NA	NA	101,78	100,39
4	Nilai IKM	Indeks	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	84,7	83,62	91,9	NA	NA	NA	NA	NA

Tabel 2.5.
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial
Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 -2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun					Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun					Persentase Capaian Pada Tahun (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	NA	100	100	100	100	NA	100	100	100	100	NA	100	100	100	100
2	Tingkat Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	NA	100	100	100	100	NA	100	100	100	100	NA	100	100	100	100

Tabel 2.6.
Capaian Kinerja Indikator Program Dinas Sosial
Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 -2024

No	Program	Indikator Kinerja Program Renstra	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun					Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun					Persentase Capaian Pada Tahun (%)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Lembaga Kesejahteraan Sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terprnuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Kegiatan di Luar SPM yang Terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Tertanganinya Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Yatim, Piatu, Yatim piatu, Lansia, dan PGOT	%	100	100	100	100	100	100	100	100	115	100	100	100	100	115	100

No	Program	Indikator Kinerja Program Renstra	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun					Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun					Persentase Capaian Pada Tahun (%)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		Terlaksananya Kegiatan di Luar SPM yang Terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase KK miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Tersalurkannya Bantuan untuk KPM yang tepat sasaran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	%	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
		Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	%	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100

Tabel 2.7.
Capaian Kinerja Indikator Kegiatan Dinas Sosial
Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 -2024

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun					Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun					Persentase Capaian Pada Tahun (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	sertifikat	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	100	100	100	100	100
2	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	0	10	10	0	10	0	10	10	0	10	100	100	100	100	100
3	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	orang	75	100	100	100	120	75	100	100	115	120	100	100	100	115	100
4	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	orang	80	120	131	136	200	80	120	131	136	200	100	100	100	100	100
5	Jumlah peserta dalam pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan SAPZA	orang	23	0	50	86	100	23	0	50	86	100	100	100	100	100	100
6	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga	keluarga	7935	2140	2200	445	2100	7935	2140	2200	445	2100	100	100	100	100	100
7	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	orang	75	60	120	60	50	75	60	120	60	50	100	100	100	100	100
8	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan	orang	144	150	131	155	150	144	150	131	155	150	100	100	100	100	100
9	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharannya pada taman makam pahlawan kabupaten/kota	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	100	100	100	100	100

Tabel 2.8.
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial
Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 -2024

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Persentase Realisasi Anggaran (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	4.702.462.962	529.360.000	722.620.000	590.371.700	687.235.400	4.594.836.497	529.341.700	722.592.700	576.644.700	672.802.450	97,71 %	100%	100%	98%	99%
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	608.220.000	2.897.371.000	2.882.087.700	1.187.287.000	1.282.028.050	447.809.908	2.892.967.060	2.881.330.432	1.100.084.447	1.300.950.440	73,63 %	100%	100%	93%	97%
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	1.873.708.500	6.664.707.400	7.093.147.700	7.137.898.836	-	1.863.067.100	4.364.808.750	7.070.527.216	7.527.036.736	-	99%	65%	100%	97%
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	59.990.500	52.575.500	161.565.000	150.559.000	-	59.965.500	52.570.500	158.431.250	150.192.250	-	100%	99.99 %	98.06 %	100%
5	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-	0	29.900.000	45.698.000	37.961.700	-	-	29.900.000	45.698.000	37.961.700	-		100%	100%	100%
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	4.481.110.000	4.514.269.000	5.146.632.516	4.204.587.109	-	4.232.359.820	3.997.758.903	4.592.036.393	4.020.505.211	-	94%	89%	100%	93%

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar memiliki beragam program dan layanan yang ditujukan kepada berbagai kelompok sasaran. Berikut adalah kelompok sasaran utama yang menjadi fokus layanan:

a. Fakir Miskin

Masyarakat yang tidak memiliki sumber penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan, baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Fakir miskin menjadi sasaran utama dalam program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi produktif.

b. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Yaitu individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang karena hambatan fisik, mental, sosial, atau ekonomi tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Termasuk di dalamnya adalah anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas, tuna wisma, pengemis, korban kekerasan, korban bencana, dan kelompok rentan lainnya.

c. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

Merupakan mitra pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial. LKS menjadi sasaran pembinaan, fasilitasi, dan kemitraan guna meningkatkan kapasitas dan efektivitas layanan sosial masyarakat.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan

Mitra Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan pada masyarakat yaitu Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, BPBD dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan gambaran pelayanan kinerja, tantangan dan peluang Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, maka dapat diidentifikasi permasalahan yaitu :

1. Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial

- a. Masih rendahnya kapasitas dan kemandirian masyarakat rentan, seperti keluarga miskin, penyandang disabilitas, dan lansia potensial, dalam meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.
- b. Minimnya akses PPKS terhadap program pemberdayaan sosial, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha produktif.
- c. Belum optimalnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga kesejahteraan sosial (LKS), dan sektor swasta dalam penguatan ekonomi sosial berbasis masyarakat.
- d. Kurangnya pembinaan berkelanjutan terhadap organisasi sosial dan relawan sosial yang berperan dalam mendukung pelayanan kesejahteraan sosial.
- e. Terbatasnya data mutakhir dan sistem informasi sosial yang menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemberdayaan sosial.

2. Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial

- a. Masih banyaknya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti anak terlantar, lansia terlantar, tuna sosial, korban kekerasan, dan korban perdagangan orang yang belum mendapatkan penanganan secara menyeluruh dan terpadu.
- b. Terbatasnya fasilitas pelayanan rehabilitasi sosial, baik dari segi sarana, prasarana, maupun tenaga profesional seperti pekerja sosial.

- c. Belum optimalnya pelaksanaan program perlindungan sosial, termasuk bantuan sosial dan jaminan sosial, karena keterbatasan data yang terverifikasi dan dinamika kondisi sosial masyarakat.
- d. Kurangnya respons cepat dan sistematis dalam penanganan korban bencana sosial maupun bencana alam, termasuk keterbatasan logistik, tenaga, dan koordinasi lintas sektor.
- e. Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan sosial, sehingga memengaruhi efektivitas program intervensi sosial yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Tabel 2.9.
Rumusan Permasalahan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).	Masih rendahnya kapasitas dan kemandirian masyarakat rentan, seperti keluarga miskin, penyandang disabilitas, dan lansia potensial, dalam meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan	Kurangnya akses terhadap pendidikan, pelatihan, dan sumber daya ekonomi ² . Rendahnya kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha produktif
	Minimnya akses PPKS terhadap program pemberdayaan sosial, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha produktif	Sosialisasi program pemberdayaan yang belum merata Terbatasnya kapasitas lembaga penyelenggara dalam menjangkau masyarakat
	Belum optimalnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, LKS, dan sektor swasta dalam penguatan ekonomi sosial berbasis masyarakat	Koordinasi lintas sektor yang belum efektif ² . Kurangnya mekanisme kemitraan formal dan integrasi program
	Kurangnya pembinaan berkelanjutan terhadap organisasi sosial dan relawan sosial yang mendukung pelayanan kesejahteraan sosial	Minimnya program pengembangan kapasitas bagi organisasi sosial dan relawan ² . Kurangnya monitoring dan evaluasi berkelanjutan
	Terbatasnya data mutakhir dan sistem informasi sosial yang menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemberdayaan sosial	Sistem informasi sosial yang belum terintegrasi ² . Kurangnya update data dan validasi data PPKS
	Masih banyaknya PPKS seperti anak terlantar, lansia terlantar, tuna sosial, korban kekerasan, dan korban perdagangan orang yang belum mendapatkan penanganan secara menyeluruh dan terpadu	Kapasitas pelayanan sosial yang terbatas ² . Kurangnya koordinasi antar lembaga terkait
	Terbatasnya fasilitas pelayanan rehabilitasi sosial, baik dari sarana, prasarana, maupun tenaga profesional seperti pekerja sosial	Anggaran terbatas untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas Kekurangan tenaga profesional yang kompeten
	Belum optimalnya pelaksanaan program perlindungan sosial, termasuk bantuan sosial dan jaminan sosial, karena keterbatasan data yang terverifikasi dan dinamika kondisi sosial masyarakat	Data penerima bantuan yang belum akurat ² . Sistem monitoring dan evaluasi yang kurang efektif
	Kurangnya respons cepat dan sistematis dalam penanganan korban bencana sosial maupun bencana alam, termasuk keterbatasan logistik, tenaga, dan koordinasi lintas sektor	Kapasitas manajemen bencana yang terbatas ² . Koordinasi dan distribusi logistik yang belum optimal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan sosial, sehingga memengaruhi efektivitas program intervensi sosial	Sosialisasi dan edukasi masyarakat yang kurang ² . Rendahnya literasi sosial masyarakat terhadap hak dan layanan sosial

2.2.2. Isu Strategis

Penyusunan isu strategis harus melihat kesenjangan antara kondisi nyata dan capaian ideal. Hal ini mencakup permasalahan mendasar yang jika tidak ditangani akan menghambat potensi daerah secara signifikan. Berdasarkan Inmendagri Nomor 2 tahun 2025, Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.

Perumusan isu strategis Dinas Sosial memperhatikan permasalahan yang ada di Dinas Sosial, Isu KLHS, Isu Nasional dan Isu Regional, berikut tabel kerja perumusan isu strategis Dinas Sosial.

Tabel 2.10.

Teknik menyimpulkan Isu Strategis Dinas Sosial

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Komitmen Pemerintah Daerah, adanya lembaga kesejahteraan sosial yang aktif memberikan pelayanan pada PPKS, adanya kemintraan dengan dunia usaha	Terbatasnya fasilitas pelayanan rehabilitasi sosial Belum optimalnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga kesejahteraan sosial (LKS)	Peningkatan angka Kemiskinan	Kemiskinan	Isu sosial: kemiskinan menuju nol persen, akses dan kualitas belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	Belum optimalnya pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan serta peninjauan terhadap visi-misi kepala daerah, sasaran RPJMD, isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dapat dirumuskan sebagai berikut :

Belum optimalnya pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Sebagian besar PPKS seperti anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas, korban kekerasan, tuna sosial, dan kelompok rentan lainnya belum mendapatkan layanan sosial yang memadai, baik dari sisi akses, keberlanjutan intervensi, maupun efektivitas pemulihan sosialnya. Keterbatasan jumlah pekerja sosial, belum meratanya fasilitas layanan rehabilitasi sosial, lemahnya koordinasi lintas sektor, dan belum optimalnya pemanfaatan data sosial menjadi tantangan utama dalam penanganan PPKS secara terpadu dan berkelanjutan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Kepala Daerah terpilih telah ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 20 Februari 2025. Bupati dan Wakil Bupati memiliki periode masa jabatan 2025-2030. Visi Bupati dan Wakil Bupati adalah **“SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi Intanpari yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera.** Visi Sesarengan Mbangun Karanganyar memiliki arti bersama sama membangun Karanganyar untuk mewujudkan Kabupaten Karanganyar yang memiliki potensi perindustrian, pertanian dan pariwisata yang berintegritas, berdaya saing dengan masyarakat yang sejahtera.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, misi RPJMD Tahun 2025-2029 berdasarkan misi kepala daerah Kabupaten Karanganyar yang terpilih :

1. Misi 1 Meningkatkan kualitas sumber daya insani, ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga dan pemuda serta kesetaraan gender.
2. Misi 2 Meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui perluasan peluang usaha, penciptaan lapangan kerja sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan prinsip kemandirian
3. Misi 3 Membangun dari desa, membangun infrastruktur, penanggulangan kemiskinan dan penanganan perlu pelayanan kesejahteraan sosial, peningkatan dan pemerataan ekonomi.
4. Misi 4 Mengembangkan birokrasi dan tata kelola pemerintah yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik
5. Misi 5 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama.

Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar berkontribusi pada Misi 3 yaitu Membangun dari desa, membangun infrastruktur, penanggulangan kemiskinan dan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, peningkatan dan pemerataan ekonomi, pada tujuan 4 meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang semakin merata dan Sasaran 8: Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan

Rumusan Tujuan jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut **“Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)”**. Sedangkan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan perlindungan PPKS dengan indikator Indeks SPM Sosial dan Persentase PPKS Non SPM yang terlayani.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah dengan indikator Nilai IKM

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar sebagaimana disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029

NSPK/ Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Kondisi Akhir Renstra
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Misi ke 3 : Membangun dari desa, membangun infrastruktur, penanggulangan kemiskinan dan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, peningkatan dan pemerataan ekonomi TJ 4) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang semakin merata Sasaran 8: Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan	Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Persentase PPKS yang terlayani	Jumlah PPKS yang diberi bantuan sesuai kebutuhan tahun n dibagi jumlah PPKS tahun n dikali 100	%	71,28	72	72,5	73	73,5	74	74,5	74,5
		Meningkatnya penanganan PPKS	Indeks SPM Sosial	SPM yang tercapai dibagi target SPM yang ada dikali 100	Indeks	100	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase PPKS Non SPM yang terlayani	Jumlah PPKS diluar SPM yang diberi bantuan tahun n dibagi jumlah PPKS diluar SPM tahun n dikali 100	%	71,07	71,78	72,28	72,78	73,27	73,77	74,27	74,27
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM	Diperoleh dari hasil survei	Indeks	92,55	92,6	92,7	92,8	92,9	93	93	93

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

3.2.1. Strategi

Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 menyebutkan bahwa Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Strategi dan kebijakan Dinas Sosial menggambarkan cara pencapaian tujuan, sasaran jangka menengah, serta target kinerja hasil (outcome) dari program prioritas RPJMD Kabupaten Karanganyar yang menjadi bagian dari tugas dan fungsi Dinas Sosial. Rumusan strategi dan arah kebijakan ini mencerminkan rencana menyeluruh Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu lima tahun ke depan untuk meraih tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Pendekatan strategis yang menyeluruh ini juga berperan sebagai alat untuk mendorong transformasi, reformasi, serta peningkatan kinerja birokrasi.

Strategi yang akan dijalankan dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatkan penanganan PPKS

Strategi dalam mencapai sasaran ini adalah :

- a. Pengembangan Sistem Layanan Sosial yang Terintegrasi dan Responsif
- b. Peningkatan Ketersediaan dan Pemutakhiran Data PPKS yang Akurat
- c. Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Organisasi Sosial
- d. Penguatan Intervensi Rehabilitasi Sosial berbasis Komunitas dan Keluarga
- e. Pemenuhan Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran dan Kondisional

Sasaran 2. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah

Strategi dalam mencapai sasaran ini adalah :

- a. Penguatan Sistem Perencanaan dan Evaluasi Berbasis Kinerja melalui penyusunan program berdasarkan data dan hasil evaluasi sebelumnya, serta memastikan penggunaan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kegiatan (IKK) secara terukur dan konsisten.
- b. Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Tata Kelola Program dan Layanan melalui pelatihan dan bimbingan teknis terkait perencanaan, penganggaran, pelaporan, serta pelayanan publik sesuai dengan SP dan SOP.

Tabel 3.2.
Tahapan Rencana Strategis

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Konsolidasi & Penguatan Dasar Penanganan PPKS	Peningkatan Akses & Jangkauan Layanan Sosial	Pengembangan Layanan Sosial Inovatif	Peningkatan Kualitas Layanan & Rehabilitasi Lanjutan	Konsolidasi Hasil, Exit Strategy & Replikasi
1. Pemutakhiran data PPKS & DTSEN 2. Penguatan SDM sosial (pelatihan pekerja sosial, pendamping) 3. Mapping kebutuhan layanan sosial dasar per kecamatan	1. Peningkatan jangkauan layanan rehabilitasi sosial 2. Pemberdayaan LKS & mitra sosial 3. Pembentukan forum koordinasi penanganan PPKS lintas sektor	1. Pengembangan model layanan berbasis komunitas (desa inklusi) 2. Digitalisasi sistem informasi sosial 3. Pilot project integrasi data PPKS dengan OPD lain	1. Revitalisasi sarana layanan sosial (rumah singgah, shelter) 2. Program pemberdayaan ekonomi PPKS pascarehabilitasi 3. Evaluasi dan penguatan SOP penanganan kasus	1. Evaluasi menyeluruh capaian sasaran Renstra 2. Replikasi praktik baik (best practices) penanganan PPKS ke desa/kelurahan 3. Penyusunan roadmap lanjutan pasca-2030

3.2.2. Arah Kebijakan

Kebijakan yang ditempuh dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai :

1. Penguatan basis data dan informasi sosial dengan pemutakhiran dan validasi data PPKS dan DTSEN secara berkala, digitalisasi layanan sosial dan integrasi data dengan OPD terkait dan pengembangan sistem informasi sosial berbasis wilayah.
2. Penguatan Layanan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial dengan penyediaan layanan rehabilitasi sosial yang terjangkau dan berkualitas, penguatan model layanan berbasis komunitas (desa inklusi sosial) dan pengembangan SOP penanganan kasus sosial yang responsif dan terintegrasi.
3. Pemberdayaan dan Kemandirian Sosial PPKS dengan pelatihan keterampilan dan dukungan ekonomi produktif pascarehabilitasi, kolaborasi dengan dunia usaha melalui program CSR dan pelibatan BLK/SMK serta penguatan peran keluarga dan lingkungan sosial dalam pemulihan PPKS.
4. Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dengan pembinaan, fasilitasi, dan pemberdayaan LKS serta organisasi sosial. Penyelenggaraan forum koordinasi sosial lintas sektor dan komunitas. Peningkatan kesadaran publik melalui edukasi dan kampanye sosial.
5. Penguatan SDM dan Kelembagaan Sosial dengan pelatihan dan sertifikasi bagi pendamping, pekerja sosial, dan relawan. Penguatan struktur dan tata kelola kelembagaan Dinas Sosial. Penataan sarana dan prasarana layanan sosial yang representatif dan fungsional.
6. Peningkatan Tata Kelola dan Inovasi Pelayanan Sosial dengan feformasi pelayanan sosial berbasis transparansi dan akuntabilitas. Pengembangan inovasi pelayanan sosial yang adaptif terhadap kebutuhan lapangan. Penguatan fungsi monitoring, evaluasi, dan pelaporan berbasis hasil.

Tabel 3.3. Arah Kebijakan Dinas Sosial Karanganyar Tahun 2025-2029

NSPK/ Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan Renstra
	(1)	(2)	(3)	(5)
Misi ke 3 : Membangun dari desa, membangun infrastruktur, penanggulangan kemiskinan dan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, peningkatan dan pemerataan ekonomi TJ 4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang semakin merata Sasaran 8: Meningkatnya	Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Sasaran I: Meningkatnya penanganan PPKS	1. Pengembangan Sistem Layanan Sosial yang Terintegrasi dan Responsif 2. Peningkatan Ketersediaan dan Pemutakhiran Data PPKS yang Akurat 3. Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Organisasi Sosial 4. Penguatan Intervensi Rehabilitasi	1. Penguatan basis data dan informasi sosial dengan pemutakhiran dan validasi data PPKS dan DTSEN secara berkala, digitalisasi layanan sosial dan integrasi data dengan OPD terkait dan pengembangan sistem informasi sosial berbasis wilayah. 2. Penguatan Layanan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial dengan penyediaan

NSPK/ Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan Renstra
	(1)	(2)	(3)	(5)
pendapatan masyarakat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan			Sosial berbasis Komunitas dan Keluarga 5. Pemenuhan Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran dan Kondisional	layanan rehabilitasi sosial yang terjangkau dan berkualitas, penguatan model layanan berbasis komunitas (desa inklusi sosial) dan pengembangan SOP penanganan kasus sosial yang responsif dan terintegrasi.
		Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	1. Penguatan Sistem Perencanaan dan Evaluasi Berbasis Kinerja melalui penyusunan program berdasarkan data dan hasil evaluasi sebelumnya, serta memastikan penggunaan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kegiatan (IKK) secara terukur dan konsisten. 2. Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Tata Kelola Program dan Layanan melalui pelatihan dan bimbingan teknis terkait perencanaan, penganggaran, pelaporan, serta pelayanan publik sesuai dengan SP dan SOP.	3. Pemberdayaan dan Kemandirian Sosial PPKS dengan pelatihan keterampilan dan dukungan ekonomi produktif pascarehabilitasi, kolaborasi dengan dunia usaha melalui program CSR dan pelibatan BLK/SMK serta penguatan peran keluarga dan lingkungan sosial dalam pemulihan PPKS. 4. Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dengan pembinaan, fasilitasi, dan pemberdayaan LKS serta organisasi sosial. Penyelenggaraan forum koordinasi sosial lintas sektor dan komunitas. Peningkatan kesadaran publik melalui edukasi dan kampanye sosial. 5. Penguatan SDM dan Kelembagaan Sosial dengan pelatihan dan sertifikasi bagi pendamping, pekerja sosial, dan relawan. Penguatan struktur dan tata kelola kelembagaan Dinas Sosial. Penataan sarana dan prasarana layanan sosial yang representatif dan fungsional. 6. Peningkatan Tata Kelola dan Inovasi

NSPK/ Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan Renstra
	(1)	(2)	(3)	(5)
				Pelayanan Sosial dengan feformasi pelayanan sosial berbasis transparansi dan akuntabilitas. Pengembangan inovasi pelayanan sosial yang adaptif terhadap kebutuhan lapangan. Penguatan fungsi monitoring, evaluasi, dan pelaporan berbasis hasil.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini difokuskan pada pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial dengan peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial sehingga berperan aktif dalam penanganan PPKS . Dalam rangka mencapai Program diatas berikut ini kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan:

- a. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut
 - 1) Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini difokuskan pada rehabilitasi sosial bagi PPKS dengan penyediaan makanan sandang, alat bantu bimbingan sosial serta kerjasama antar lembaga dalam penanganan PPKS. Dalam rangka mencapai Program diatas berikut ini kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan:

- a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut
 - 1) Penyediaan Permakanan
 - 2) Penyediaan Sandang
 - 3) Penyediaan Alat Bantu
 - 4) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - 5) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - 6) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 - 7) Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
 - 8) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - 9) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 - 10) Pemberian Layanan Kedaruratan
 - 11) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - 12) Pemberian Layanan Rujukan
- b. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut
 - 1) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
 - 2) Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Program ini difokuskan pada pendataan fakir miskin serta pemberian bansos. Dalam rangka mencapai Program diatas berikut ini kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan:

- a. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut
 - 1) Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 - 3) Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

4. Program Penanganan Bencana

Program ini difokuskan pada perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan sosial. Dalam rangka mencapai Program diatas, berikut ini kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan:

- a. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut
 - 1) Penyediaan Makanan
 - 2) Penyediaan Sandang
 - 3) Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
 - 4) Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
 - 5) Pelayanan Dukungan Psikososial

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini difokuskan pada pengelolaan taman makam pahlawan sesuai dengan standar yang berlaku, berikut ini kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan:

- a. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut
 - 1) Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - 2) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini difokuskan pada pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang menangani tentang kebutuhan rutin untuk mendukung kelancaran administrasi didalam penyelenggaraan pemerintahan, berikut ini kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut
- 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tabel 4.1.
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Sosial

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan PD	Sasaran PD	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
Misi ke 3 : Membangun dari desa, membangun infrastruktur, penanggulangan kemiskinan dan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, peningkatan dan pemerataan ekonomi TJ 4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang semakin merata Sasaran 8: Meningkatkan pendapatan masyarakat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan	Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)				Persentase PPKS yang terlayani		
		Sasaran I: Meningkatnya penanganan PPKS			Indeks SPM Sosial		
					Persentase PPKS Non SPM yang terlayani		
			Meningkatnya PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Berkembangnya PSKS	Jumlah PSKS yang berkembang	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis di luar panti		% warga negara penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan PD	Sasaran PD	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah laporan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
				Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Permakanan	
				Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Alat Bantu	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Perbekalan Kesehatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perbekalan Kesehatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan PD	Sasaran PD	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
				Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan PD	Sasaran PD	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
				Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
				Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Kedaruratan	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
				Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Rujukan	
				Terlaksananya PPKS bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial	Jumlah Laporan PPKS bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial yang mendapat layanan rehabilitasi	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan PD	Sasaran PD	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	
				Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial		Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data kesejahteraan sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
					% PPKS yang mendapat bansos (BLT, Sembako)		
				Terkelolanya data fakir miskin tingkat kabupaten	Jumlah Laporan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan pemberian bantuan sosial		
				Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan PD	Sasaran PD	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
			Meningkatnya penanganan warga negara korban bencana kabupaten/kota		% warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				Terlaksananya perlindungan pada korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota	Laporan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan PD	Sasaran PD	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	
				Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	
				Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
				Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
				Terpenuhi Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelayanan Dukungan Psikososial	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan PD	Sasaran PD	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			Terpenuhinya standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan		Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
				Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana TMPN yang diperbaiki/dipelihara	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
		Sasaran 2: Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah			Nilai IKM		
			Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas perencanaan perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Keuangan	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan PD	Sasaran PD	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersusunnya evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terwujudnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan PD	Sasaran PD	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tertatanya Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan PD	Sasaran PD	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terwujudnya Pemeliharaan barang milik daerah	Terwujudnya Pemeliharaan barang milik daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Adapun Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Sosial yang disertai target indikator kinerja dan anggaran disampaikan melalui tabel berikut:

Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Kondisi awal 2024	Baseline 2025		Target Tahun									
							2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	100	100	39.428.250	100	52.758.600	100	52.758.600	100	222.758.600	100	252.758.600	100	52.758.600
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Berkembangnya PSKS	Jumlah PSKS yang berkembang	orang	199	199	39.428.250	199	52.758.600	199	52.758.600	199	222.758.600	199	252.758.600	199	52.758.600
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	199	199	39.428.250	199	52.758.600	199	52.758.600	199	222.758.600	199	252.758.600	199	52.758.600
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis di luar panti	% warga negara penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	422.353.200	100	530.000.000	100	530.000.000	100	530.000.000	100	530.000.000	100	530.000.000
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah laporan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Laporan	4	4	252.000.000	4	272.000.000	4	272.000.000	4	272.000.000	4	272.000.000	4	272.000.000
Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	250	200	40.000.000	200	40.000.000	200	40.000.000	200	40.000.000	200	40.000.000	200	40.000.000
Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun	Orang	250	200	30.000.000	200	30.000.000	200	30.000.000	200	30.000.000	200	30.000.000	200	30.000.000

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Kondisi awal 2024	Baseline 2025		Target Tahun									
							2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota														
Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	11	10	40.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	228	42	30.000.000	42	30.000.000	42	30.000.000	42	30.000.000	42	30.000.000	42	30.000.000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	250	200	27.470.000	200	27.470.000	200	27.470.000	200	27.470.000	200	27.470.000	200	27.470.000
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	250	200	2.025.000	200	2.025.000	200	2.025.000	200	2.025.000	200	2.025.000	200	2.025.000
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	258	29	2.025.000	29	2.025.000	29	2.025.000	29	2.025.000	29	2.025.000	29	2.025.000
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	250	180	31.646.000	180	31.646.000	180	31.646.000	180	31.646.000	180	31.646.000	180	31.646.000
Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	Orang	28	20	10.025.000	20	10.025.000	20	10.025.000	20	10.025.000	20	10.025.000	20	10.025.000

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Kondisi awal 2024	Baseline 2025		Target Tahun									
							2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Kewenangan Kabupaten/Kota	Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota														
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	250	42	10.025.000	42	10.025.000	42	10.025.000	42	10.025.000	42	10.025.000	42	10.025.000
Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	22	32	28.784.000	32	28.784.000	32	28.784.000	32	28.784.000	32	28.784.000	32	28.784.000
Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Perbekalan Kesehatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-	-	200	20.000.000	200	20.000.000	200	20.000.000	200	20.000.000	200	20.000.000
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	TERehabilitasinya PPKS bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial	Jumlah Laporan PPKS bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial yang mendapat layanan rehabilitasi	Laporan	4	4	170.535.200	4	258.000.000	4	258.000.000	4	258.000.000	4	258.000.000	4	258.000.000
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	200	200	167.535.200	200	60.000.000	200	60.000.000	200	60.000.000	200	60.000.000	200	60.000.000
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	8	11	3.000.000	11	3.000.000	11	3.000.000	11	3.000.000	11	3.000.000	11	3.000.000

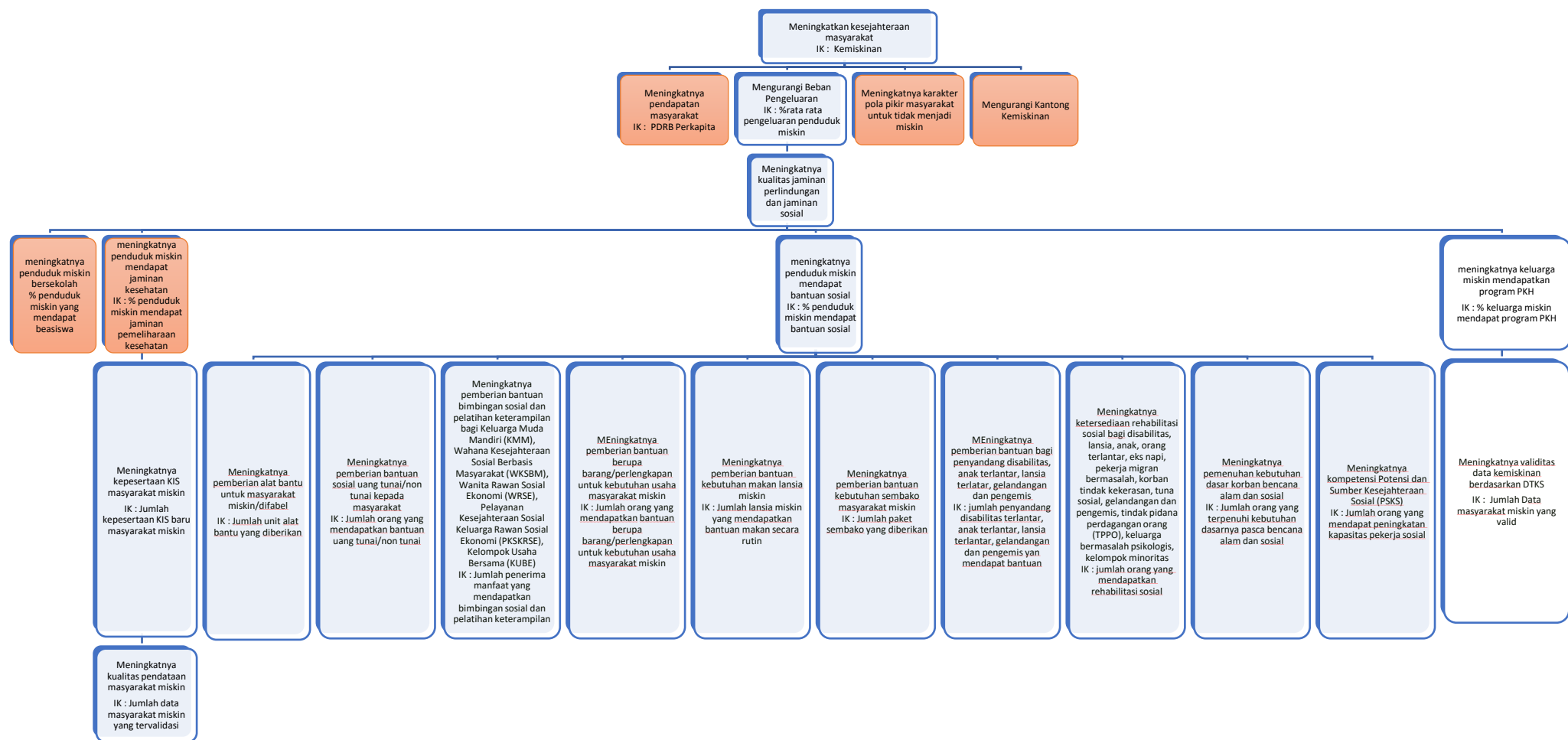
Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Kondisi awal 2024	Baseline 2025		Target Tahun									
							2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	37	195.000.000	37	195.000.000	37	195.000.000	37	195.000.000	37	195.000.000
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data kesejahteraan sosial	%	100	100	5.688.040.170	100	5.810.918.500	100	5.810.918.500	100	5.810.918.500	100	5.810.918.500	100	5.810.918.500
		% PPKS yang mendapat bansos (BLT, Sembako)	%	3,98	3,98		3,98		4,08		4,08		4,08		4,38	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya data fakir miskin tingkat kabupaten	Jumlah Laporan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	4	4	1.475.000.000	4	1.475.000.000	4	1.475.000.000	4	1.475.000.000	4	1.475.000.000	4	1.475.000.000
		Jumlah Laporan pemberian bantuan sosial	Laporan	4	4	4.243.040.170	4	4.335.918.500	4	4.335.918.500	4	4.335.918.500	4	4.335.918.500	4	4.335.918.500
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	400.000	400.000	1.425.000.000	400.000	1.425.000.000	400.000	1.425.000.000	400.000	1.425.000.000	400.000	1.425.000.000	400.000	1.425.000.000
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	5.000	5.000	4.243.040.170	5.197	4.335.918.500	5.197	4.335.918.500	5.197	4.335.918.500	5.197	4.335.918.500	5.197	4.335.918.500
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	50	20.000.000	240	50.000.000	240	50.000.000	240	50.000.000	240	50.000.000	240	50.000.000
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya penanganan warga negara korban bencana kabupaten/kota	% warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	94.192.400	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	Terlaksananya perlindungan pada korban bencana	Laporan Perlindungan Sosial Korban Bencana	Laporan	5	5	94.192.400	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Kondisi awal 2024	Baseline 2025		Target Tahun									
							2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
dan Sosial Kabupaten/Kota	alam dan sosial Kabupaten/Kota	Alam dan Sosial Kabupaten/Kota														
Penyediaan Makanan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	200	200	40.000.000	200	40.000.000	200	40.000.000	200	40.000.000	200	40.000.000	200	40.000.000
Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	200	200	30.000.000	200	30.000.000	200	30.000.000	200	30.000.000	200	30.000.000	200	30.000.000
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	4	8	9.192.400	8	40.000.000	8	40.000.000	8	40.000.000	8	40.000.000	8	40.000.000
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	30	10.000.000	30	25.000.000	30	25.000.000	30	25.000.000	30	25.000.000	30	25.000.000
Pelayanan Dukungan Psikososial	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	50	5.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Terpenuhinya standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	%	100	100	31.639.400	100	31.641.400	100	31.641.400	100	31.641.400	100	31.641.400	100	31.641.400
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana TMPN yang diperbaiki/dipelihara	Unit	1	1	31.639.400	1	31.641.400	1	31.641.400	1	31.641.400	1	31.641.400	1	31.641.400
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	1	1	31.639.400	1	31.641.400	1	31.641.400	1	31.641.400	1	31.641.400	1	31.641.400

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Kondisi awal 2024	Baseline 2025		Target Tahun									
							2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Nasional Kabupaten/Kota															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas perencanaan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		71,2	72	4.815.981.606	72,5	4.976.874.5 26	72,75	4.976.874.5 26	73	4.976.874.5 26	73,25	4.976.874.5 26	73,5	4.976.874.52 6
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Keuangan	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Keuangan	%	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokume n	6	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	TERlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokume n	3	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	4	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	3.256.981.606	100	3.417.874.5 26	100	3.417.874.5 26	100	3.417.874.5 26	100	3.417.874.5 26	100	3.417.874.52 6
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	23	23	3.256.981.606	23	3.417.874.52 6	23	3.417.874.52 6	23	3.417.874.52 6	23	3.417.874.52 6	23	3.417.874.526
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	30.000.000	100	30.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	30.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	2	2	30.000.000	2	30.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	2	30.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	544.000.000	100	544.000.000	100	544.000.000	100	544.000.000	100	544.000.000	100	544.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi	Tersedianya Komponen Instalasi	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan	Paket	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Kondisi awal 2024	Baseline 2025		Target Tahun									
							2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bangunan kantor yang disediakan														
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tertatanya Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Paket	5	5	9.000.000	5	9.000.000	5	9.000.000	5	9.000.000	5	9.000.000	5	9.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	%	100	100	70.000.000	100	70.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	100	70.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	2	2	20.000.000	2	20.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	2	20.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	3	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	565.000.000	100	565.000.000	100	565.000.000	100	565.000.000	100	565.000.000	100	565.000.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	12	160.000.000	12	160.000.000	12	160.000.000	12	160.000.000	12	160.000.000	12	160.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Kondisi awal 2024	Baseline 2025		Target Tahun									
							2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pemeliharaan barang milik daerah	Terwujudnya Pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	73	73	200.000.000	73	200.000.000	73	200.000.000	73	200.000.000	73	200.000.000	73	200.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000



Gambar 4.1.
Pohon Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar

Berikut ini program prioritas dan program unggulan daerah dalam lima tahun ke depan:

Tabel 4.3.
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis di luar panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
			Penyediaan Permakanan	
			Penyediaan Sandang	
			Penyediaan Alat Bantu	
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
			Pemberian Layanan Kedaruratan	
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
			Pemberian Layanan Rujukan	
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya penanganan warga negara korban bencana kabupaten/kota	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Makanan	
			Penyediaan Sandang	
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
			Pelayanan Dukungan Psikososial	
5	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Terpenuhinya standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas perencanaan perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Berikut ini dukungan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar pada 35 Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah yang didelegasikan ke Kabupaten/Kota:

Tabel 4.4.
Dukungan Kegiatan Kabupaten Karanganyar Terhadap 35 Program Prioritas
Provinsi Jawa Tengah yang Didelegasikan ke Kabupaten/Kota

No.	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan/Subkegiatan	Urusan
1	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota • Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosial, setda bagian hukum
2	Pelindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial • Penyediaan Permakanan	Sosial
3	Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM	• Penyediaan Sandang • Penyediaan Alat Bantu • Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti • Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga • Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial • Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat • Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak • Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar • Pemberian Layanan Data dan Pengaduan • Pemberian Layanan Kedaruratan • Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga • Pemberian Layanan Rujukan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial • Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA • Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota • Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga • Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat PROGRAM PENANGANAN BENCANA Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota • Penyediaan Makanan • Penyediaan Sandang • Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi • Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan • Pelayanan Dukungan Psikososial	Sosial, Koperasi UMKM

4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur strategis yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran utama Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dalam mendukung pembangunan daerah. IKU mencerminkan capaian hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program prioritas yang berkontribusi langsung terhadap visi dan misi kepala daerah.

Penyusunan IKU dilakukan secara terintegrasi dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah serta mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti RPJMD dan Rencana Pembangunan Nasional. IKU disusun dengan prinsip SMART (*Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*) sehingga dapat memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan program, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi kinerja. Berikut adalah indikator kinerja utama Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar :

Tabel 4.5.
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial

No	Indikator	Formula Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Akhir Periode Renstra	Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Persentase PPKS yang terlayani	Jumlah PPKS yang diberi bantuan sesuai kebutuhan tahun n dibagi jumlah PPKS tahun n dikali 100	%	71,28	72	72,5	73	73,5	74	74,5	74,5	
2	Indeks SPM Sosial	SPM yang tercapai dibagi target SPM yang ada dikali 100	Indeks	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase PPKS Non SPM yang terlayani	Jumlah PPKS diluar SPM yang diberi bantuan tahun n dibagi jumlah PPKS diluar SPM tahun n dikali 100	%	71,07	71,78	72,28	72,78	73,27	73,77	74,27	74,27	
4	Nilai IKM	Diperoleh dari hasil survei	Indeks	92,55	92,6	92,7	92,8	92,9	93	93	93	

4.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran utama yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar selama periode perencanaan. IKK disusun secara terukur, relevan, dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar. Berikut adalah indikator kinerja kunci (IKK) Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar:

Tabel 4.6.
Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Formula	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja Tahun						Kondisi Ahir Periode Renstra	Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran}}{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota}} \times 100\%$	%	NA	100	100	100	100	100	100	100	
2	Tingkat Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	$\frac{\text{Jumlah korban penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan di luar panti}}{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis}} \times 100\%$	%	NA	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 - 2029.

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Sosial akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2030. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar wajib berpedoman pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 adalah sesuai dengan masa berlaku RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2030.

5.3. Pedoman Penyusunan Evaluasi dalam Manajemen Pengelolaan Resiko

Dokumen Renstra Dinas Sosial menjadi dasar dalam penyusunan Manajemen Pengelolaan Risiko dengan melakukan analisis atas resiko penyebab dan dampak pada rencana strategis organisasi dan rencana operasional organisasi.

Demikian Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 – 2029 ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO



Telah dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
2. Kepala Baperlitbang	
3. Sekretaris Baperlitbang	
4. Kepala Bidang Sosial Budaya Baperlitbang	